

BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA

PROBLEMS AND CHALLENGES ON RADICALIZATION AND DERADICALIZATION OF TERRORISM IN INDONESIA

Samto Hadi Isnanto¹

Denma Mabes TNI Angkatan Udara
(samtoisnanto@gmail.com)

Abstrak – Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menjelaskan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia. Melalui studi kepustakaan, artikel ini berupaya mencari jawaban beberapa pertanyaan yaitu: Apa radikalisasi dan deradikalisasi terorisme? Bagaimana proses radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Apa saja yang menjadi masalah dan tantangan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Hasil penelitian menemukan bahwa radikalisasi dan deradikalisasi terorisme adalah istilah yang tidak memiliki definisi yang solid. Definisi istilah tersebut sangat dipengaruhi secara kuat oleh konteks dan kepentingan orang, kelompok atau organisasi yang mendefinisikannya. Radikalisasi di Indonesia bukan sebuah proses yang sederhana, tetapi merupakan proses yang panjang dan rumit melalui berbagai jalan dan metode, begitupula deradikalisasi teroris adalah proses yang sulit karena menyangkut masalah ideologi keagamaan. Namun demikian, deradikalisasi teroris tetap diperlukan karena jika ideologi mereka berubah menjadi tidak radikal maka mereka akan secara permanen meninggalkan ideologi radikalnya.

Kata kunci: radikalisasi, deradikalisasi, masalah dan tantangan, terorisme

Abstract – This paper aims to investigate and describe radicalization and deradicalization of terrorism in Indonesia. Through library study, this paper seeks to answer the questions: What is radicalization and deradicalization of terrorism? How is the process of radicalization and deradicalization in Indonesia? What are the problems and challenges to deradicalization in Indonesia? The paper found that radicalization and deradicalization are terms that have no solid definition. Their definition is strongly influenced by the context and interest of the countries or groups who define them. Radicalization in Indonesia is not a simple process, but a lengthy process through many ways and methods, while deradicalization of terrorism is very difficult to do because it involves religious ideology. However, deradicalization is necessary because if terrorists are deradicalized ideologically then they will be permanently deradicalized.

Keywords: Radicalization, deradicalization, problems and challenges, terrorism

¹ Kolonel Lek Samto Hadi Isnanto adalah Pamen Denma Mabes TNI Angkatan Udara yang diperbantukan sebagai anggota analis DAS BIN. Seluruh isi yang termuat dalam artikel ini merupakan data dan analisis pribadi dari hasil studi kepustakaan. Penulis tidak merepresentasikan institusi manapun. Penulis dapat dihubungi di alamat email samtoisnanto@gmail.com.

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia mengalami beberapa serangan teroris oleh individu ataupun kelompok radikal teroris. Sebut saja serangan teroris di Bali, Hotel JW Mariot, Kedubes Australia di Jakarta, Gereja Kepunton di Solo, Masjid Polres di Cirebon, Bom Buku di kantor Jaringan Islam Liberal, dan masih banyak lagi aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Seluruh serangan tersebut dilakukan oleh individu-individu yang tergabung dalam jaringan kelompok radikal teroris yang menggunakan ideologi keagamaan sebagai pembedanya.

Untuk mengatasi ancaman terorisme, Indonesia telah menggunakan pendekatan deradikalisasi. Selain di Indonesia, program deradikalisasi ini juga berkembang di berbagai negara untuk melawan berkembangnya aksi terorisme yang dipicu oleh ideologi keagamaan yang radikal. Contohnya program yang dilakukan oleh beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman, Mesir, dan Aljazair; di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Sementara di kawasan Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Denmark.²

Deradikalisasi sebagai konsep dalam mencegah radikalisme adalah sebuah konsep yang relatif baru untuk para anggota kelompok radikal bersenjata. Hingga saat ini belum banyak informasi yang tersedia untuk mengevaluasi keefektifan program deradikalisasi. Belum banyak literatur tentang deradikalisasi, literatur yang terus berkembang adalah penelitian yang berhubungan dengan radikalisme. Para akademisi, praktisi dan teoritis terorisme cenderung berpandangan bahwa deradikalisasi adalah pekerjaan sulit karena mereka termotivasi oleh sebuah ideologi yang berakar pada agama dan selalu terkait dengan tanggungjawab mereka terhadap agamanya. Meski demikian, deradikalisasi diperlukan untuk menetralkan ancaman terorisme dari individu-individu yang termotivasi oleh ideologi keagamaan. Alasannya adalah jika berhentinya perilaku kekerasan teroris didasari oleh motivasi selain ideologi maka tidak akan bersifat permanen. Suatu saat mereka akan kembali menjadi teroris jika kondisi tidak menguntungkan baginya. Tetapi jika teroris secara ideologi telah berubah, maka dia akan meninggalkan paham terorismenya secara permanen.

² Angel Rabassa et.al, *Deradicalizing Islamist Extremists*, (USA: Rand Corporation, 2011), hlm.45-160.

Metodologi

Artikel ini mencoba untuk membahas radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia beserta berbagai masalah dan tantangannya. Beberapa *textbook* dan artikel ilmiah tentang terorisme digunakan sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan: Apa definisi radikalisasi dan deradikalisasi terorisme? Bagaimana proses radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Apa permasalahan dan tantangan deradikalisasi di Indonesia?

Hasil penelitian menemukan bahwa terorisme adalah istilah yang tidak memiliki definisi yang baku. Definisinya sangat dipengaruhi oleh konteks dan kepentingan orang, kelompok atau organisasi yang mendefinisikannya. Radikalisasi adalah sebuah proses seseorang ataupun kelompok mengadopsi paham radikal terorisme. Sedangkan deradikalisasi adalah sebuah proses seseorang meninggalkan paham radikal terorismenya. Radikalisasi di Indonesia bukan sebuah proses yang sederhana, tetapi merupakan proses yang panjang dan rumit melalui berbagai jalan dan metode, begitupula deradikalisasi terorisme adalah proses yang sulit karena menyangkut masalah ideologi keagamaan. Namun demikian, deradikalisasi terorisme tetap diperlukan agar mereka dapat secara permanen meninggalkan ideologi radikalnya. Perlawanan dari sebagian masyarakat yang menentang program deradikalisasi dan belum adanya alat ukur/indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan deradikalisasi merupakan masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pegiat program deradikalisasi terorisme di Indonesia.

Pengertian Terorisme

Pengertian terorisme hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi yang mempelajari terorisme. Berbagai definisi terorisme belum menjadi kesepakatan secara universal. Untuk keperluan artikel ini, penulis mengutip definisi yang dikeluarkan oleh departemen pertahanan Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Menurut *US Department of State*, “*terrorism is defined as politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience*”.³

³ Charles L. Ruby, “The Definition of Terrorism,” *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 2002, hlm.9–14.

Sedangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan bahwa “*terrorism is premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience (US Department of Defense)*”.⁴

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui undang-undang nomor 15 tahun 2003 mendefinisikan bahwa “*terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas nasional*”.⁵

Konsep Radikalisasi Terorisme

Charles E Allen dalam Angel Rabassa, menyatakan bahwa “*the term radicalization is defined as the process of adopting an extremist belief system, including the willingness to use, support, or facilitate violence, as a method to effect societal change*”.⁶ Istilah radikalisasi didefinisikan sebagai proses pengadopsian sebuah sistem kepercayaan yang ekstrim, termasuk kerelaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk mempengaruhi perubahan sosial.

Alex Schmidt dari Pusat Kontra Terorisme di Belanda, menyebutkan bahwa sebuah model radikalisasi yang cukup berpengaruh diperkenalkan oleh Quintan Wiktorowicz pada tahun 2005.⁷ Dalam penelitiannya terhadap berbagai komunitas ekstrimis Muslim di Inggris, Wiktorowicz menemukan bahwa mereka yang rentan terlibat dalam kelompok terorisme adalah individu-individu yang pemahaman ilmu agamanya kurang mendalam. Gambar berikut adalah ilustrasi proses radikalisasi terhadap kelompok radikal di Inggris.

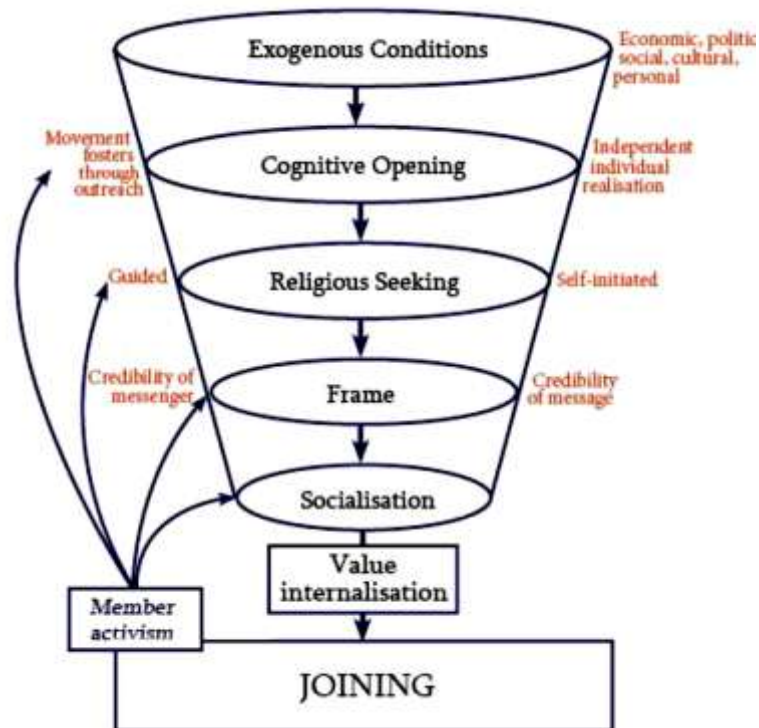
⁴ Richard English, *Terrorism How to Response*, (New York: Oxford University Press 2009), hlm.2.

⁵ Sukawarsini Djelantik, Ph.D, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Indonesia: Pustaka Obor, 2010), hlm.74.

⁶ Angel Rabassa, *op.cit*, hlm.1.

⁷ Alex P. Schmid, *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*, (The Hague:ICCT, 2013), hlm. 23-24.

Gambar 1. Wiktorowicz's diagram for joining extremist or terrorist groups



Sumber: Schmid Alex P (Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review. The Hague: ICCT, 2013).

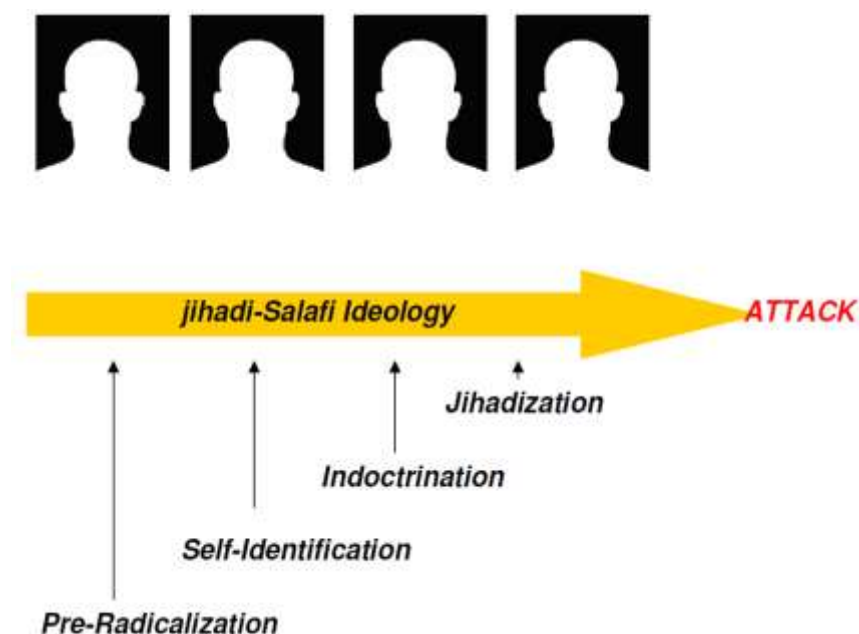
Wiktorowicz menyatakan bahwa permulaan dari proses radikalisasi yaitu pada saat seseorang mulai membuka dirinya terhadap ide-ide dan dunia baru yang dianggap benar sehingga meninggalkan pandangan lamanya, tahap ini ia sebutkan sebagai *cognitive opening*. Menurutnya, keluhan-keluhan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan personal merupakan faktor-faktor dari luar yang mendorong individu bergabung kedalam kelompok radikal. Tahapan selanjutnya adalah *religious seeking*. Pada tahapan ini seseorang mulai mencari makna dari keagamaan. Mereka mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti diskusi-diskusi maupun ceramah-ceramah baik secara terbuka maupun tertutup.

Pada tahap ini anggota kelompok radikal yang memiliki kredibilitas tinggi mudah mempengaruhi individu-individu yang rentan terhadap radikalisme. Berikutnya adalah *framing*. Pada tahap ini para pendakwah dari kelompok radikal yang memiliki kredibilitas menyampaikan dakwah-dakwahnya untuk menarik individu-individu yang masih rentan tersebut supaya tertarik masuk dalam kelompoknya. Teknik-teknik agitasi dan dalil-dalil

keagamaan digunakan untuk meyakinkan para calon anggota kelompok. Berikutnya adalah tahap *socialisation*. Pada tahap ini individu-individu mulai mendapatkan instruksi-instruksi keagamaan yang memfasilitasi indoktrinasi, membangun identitas eksklusif, dan melakukan perubahan nilai-nilai keyakinan. Tahap akhir adalah *internalization*. Pada tahap ini individu mulai memahami dan mendalami ideologi barunya dan menanamkan pada keyakinannya sebagai ideologi yang paling benar. Selanjutnya individu-individu tersebut bergabung dalam kelompok radikal dan siap untuk melakukan aksi terorisme.

Sementara itu, Michael D. Silber dan Arvin Bhatt, dari *New York Police Department*, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa proses radikalisasi yang terjadi di negara Barat adalah melalui empat fase yaitu “*pre radicalization, self identification, indoctrination, and jihadization (attact)*.”⁸ Dalam penelitiannya terhadap beberapa orang yang terlibat aksi terorisme di Barat (Amerika dan Eropa) yang meliputi negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Spanyol, maka ditemukan polanya sama meskipun terjadi perbedaan-perbedaan faktor penyebabnya. Fase-fase radikalisasi seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Model Proses Radikalisasi Silber dan Bhatt



Sumber: Michael D. Silber dan Arvin Bhatt, *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, (New York: NYPD, 2007).

⁸ Michael D. Silber dan Arvin Bhatt, *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, (New York: NYPD, 2007), hlm.21-23.

Silber dan Bhatt, menegaskan bahwa ideologi merupakan *driver* yang memotivasi beberapa anak muda di Barat yang ditelitinya menjadi teroris di tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Ideologi menuntun pergerakan mereka, mengidentifikasi isu-isu, menyetir rekrutmen dan sebagai landasan/dasar mereka bertindak. Ideologi telah memberikan inspirasi kepada beberapa kelompok teroris lokal seperti pengebom di Madrid pada Maret 2004, pengebom di London pada Juli 2005, kelompok teroris yang ditangkap di Australia tahun 2005 dan kelompok teroris di Toronto yang tertangkap pada Juni 2006.

Hasil penelitian mereka mengungkap bahwa proses radikalisasi kelompok teroris yang ditelitinya melalui empat fase yaitu: *Pre-Radicalization*; *Self-Identification*; *Indoctrination*; dan *Jihadization*. Lebih lanjut, Silber menyatakan bahwa setiap fase adalah unik dan memiliki ciri tersendiri. Seluruh individu yang memulai proses tidak selalu dan harus melewati seluruh fase. Banyak dari mereka yang berhenti atau meninggalkan proses pada titik yang berbeda. Meskipun model ini berjenjang, individu tidak selalu mengikuti seluruh tahapan secara sempurna. Individu yang berhasil melalui seluruh proses seringkali terlibat dalam perencanaan dan tindakan eksekusi terorisme.

Pre-radicalisation merupakan titik awal dari individu sebelum mereka terlibat proses radikalisasi. Fase ini merupakan situasi kehidupan mereka sebelum mereka masuk dalam proses radikalisasi untuk menganut ideologi Salafi radikal. Mayoritas individu yang terlibat dalam aksi terorisme berasal dari remaja biasa yang memiliki pekerjaan dan hanya sedikit yang memiliki catatan ataupun sejarah kriminal.

Self-Identification atau identifikasi diri merupakan fase dimana mereka secara individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, mereka memulai mengeksplorasi ideologi radikal, dan secara gradual mulai meninggalkan identitas lamanya dan mulai mengasosiasikan dirinya dengan ideologi barunya seperti milik aslinya. Katalisator dalam pencarian kepercayaan/agama baru adalah *cognitive opening*, atau krisis, yang mengguncang keteguhan kepercayaan lamanya dan membuka individu menerima pandangan-pandangan dunia. Dapat berupa banyak pemicu sebagai katalisator dalam identifikasi diri ini yaitu meliputi: motif ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau terhambat mobilitasnya; motif sosial seperti teralienasi, diskriminasi dan rasisme baik

nyata maupun tidak; serta motif politik seperti konflik internasional yang melibatkan muslim; motif pribadi seperti meninggalnya keluarga terdekat.

Indoctrination atau indoktrinasi merupakan fase dimana individu semakin meningkatkan kepercayaan barunya secara progresif, sepenuhnya memutuskan mengadopsi ideologi jihad salafi yang mana kondisi dan lingkungan mendukung untuk langkah/tindakan lanjutannya. Tindakan tersebut adalah militansi jihad. Fase ini secara khusus difasilitasi oleh seorang ideolog. Sementara dalam identifikasi diri bisa sebagai tindakan individu, bertalian dengan seseorang yang sama gagasan dengan dirinya menjadi faktor yang dapat memperdalam proses ini. Melalui fase indoktrinasi ini seleksi diri grup menjadi penting ketika pandangan-pandangan radikal terus didorong dan diperkuat.

Jihadization atau dalam konteks ini melakukan serangan adalah fase dimana individu menerima tindakan kekerasan sebagai solusi untuk mencapai tujuannya. Individu pada fase ini merasa bangga sebagai pejuang ideologi dan sebagai pejuang dalam melakukan perang suci. Puncaknya kelompok ini mulai operasional untuk melakukan perencanaan dan serangan teroris sebagai jihad.

Radikalisasi Terorisme di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, gerakan radikal, khususnya yang berbasis agama di Indonesia bukan barang baru, tetapi telah mengakar sejak lama di masyarakat Indonesia.⁹ Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo merupakan sebuah gerakan kelompok radikal yang ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Kartosuwiryo menentang pemerintahan Republik Indonesia yang tidak menerapkan syariat Islam dalam mengatur dan mengelola negara. Hal ini dinilainya sebagai sebuah pengkhianatan pemerintah republik Indonesia terhadap umat Islam di Indonesia. Akibat pertentangannya dengan pemerintah Indonesia tersebut, Kartosuwiryo melakukan gerakan pemberontakan dengan tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII)

⁹ Hasan Hamka dkk, *Blueprint Deradikalisasi*, (Jakarta: BNPT 2013), hlm.10

yang diproklamasikan di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949.¹⁰ Gerakan berbasis keagamaan ini merupakan embrio dari gerakan kelompok teroris Jemaah Islamiah yang telah melakukan beberapa kali aksi pengeboman di beberapa tempat di Indonesia.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh tim psikologi UI, proses bergabungnya seseorang dengan kelompok teroris di Indonesia sebagian besar terjadi dengan cara bertemu dengan orang-orang yang telah terlibat lebih dulu. Pertemuan tersebut berlangsung dalam konteks mereka sedang mempelajari Islam seperti di pesantren, majelis taklim, sekolah, kampus, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka dibesarkan dalam keluarga Islam yang menekankan pelaksanaan syariat Islam dalam kondisi apapun. Dengan demikian, segalanya telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, mereka mencari pembenaran eksternal yang dalam tinjauan psikologi disebut “*extra punitive*” sehingga non muslim, pemerintah, militer, orang asing seperti Amerika adalah sebagian dari mereka yang harus disalahkan.¹¹ Mereka harus kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kebenaran yang mereka pahami dan ikuti. Jika mereka tidak mengikuti keinginannya, maka mereka harus dilawan dengan jihad seperti yang mereka lakukan dewasa ini.

Proses perekrutan dilakukan dengan menyasar mereka-mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Melalui para guru, kerabat, teman dalam organisasi, subyek ditawarkan informasi keagamaan yang dibutuhkan ataupun langsung ditawarkan untuk berkomitmen membela perjuangan Islam maupun balas dendam terhadap individu, kelompok, ataupun organisasi yang dianggapnya sebagai musuh-musuh Islam. Mereka dijanjikan sebuah pekerjaan, kehidupan yang lebih enak bahkan surga bagi mereka yang menjadi syuhada, mati karena membela Islam. Para anggota baru yang direkrut didorong terus untuk meninggalkan identitas lamanya dan mengganti identitas baru seperti kelompoknya. Menurut Simeon dan Abugel dalam Sarwono, hal ini sejalan dengan proses psikologis yang disebut “*depersonalisasi*”. Jika sudah demikian, maka subyek melupakan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologis*, (Jakarta/Tangerang: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 49.

seluruh kepentingan pribadi mereka dan menggantinya dengan kepentingan tujuan organisasi.¹²

Kelompok teroris terus menyebarkan paham radikalnya melalui berbagai macam cara. Pola penyebarannya berkembang dengan cara-cara yang konvensional seperti melalui ceramah langsung atau tatap muka sampai pada penggunaan teknologi modern dengan memanfaatkan internet sebagai medianya. Radikalisasi terorisme juga dilakukan melalui penerbitan majalah, buletin, dan situs-situs yang menyebarkan propaganda jihad dengan senjata, petunjuk pembuatan bom, cara-cara penyerangan dan lain-lainnya yang mengarah pada kegiatan serangan terorisme.

Secara garis besar, radikalisasi terorisme di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola yaitu: melalui media massa baik berupa radio, buku, majalah, internet; komunikasi langsung yaitu dalam bentuk ceramah, dakwah, dan diskusi; hubungan kekeluargaan yaitu melalui bentuk pernikahan, kekerabatan dan keluarga; lembaga pendidikan baik itu umum maupun pesantren. Sebagai bukti terus berjalannya proses radikalisasi terorisme di Indonesia, hingga saat ini adalah terjadinya fenomena bergabungnya para pemuda-pemudi Indonesia menjadi anggota *Islamic State of Iraq and Syria*. Menghilangnya 15 orang Indonesia dari kelompok wisata di Turki dan ditangkapnya 15 orang Indonesia oleh aparat keamanan Turki di wilayah perbatasan Turki-Suriah mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan tempat yang subur untuk berkembangnya paham radikal teroris.

Deradikalisasi Terorisme

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT mendefinisikan deradikalisasi adalah semua upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, narapidana, mantan narapidana beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi radikal dengan

¹² *Ibid.*, hlm. 50.

mengedepankan prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.¹³

Sementara itu, Omar Ashour, seorang pakar terorisme Mesir menyatakan bahwa deradikalisasi adalah:

*De-radicalization is a process of relative change within Islamist movements, one in which radical group reverses its ideology and de-legitimizes the use of violent methods to achieve political goals, while also moving towards and acceptance of gradual social, political and economic changes within a pluralists context.*¹⁴

Deradikalisasi adalah sebuah proses di dalam pergerakan *Islamist* yang mana kelompok radikal mentransformasi ideloginya dan tidak menggunakan metode-metode/cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya, sembari bergerak untuk menerima perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial secara gradual dalam konteks kemajemukan.

Konsep Deradikalisasi Terorisme

Deradikalisasi terorisme merupakan konsep yang hingga kini masih menjadi bahan silang pendapat di kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat. Pro dan kontra terhadap program ini terus bergulir berdasarkan argumen masing-masing pihak. Para akademisi dan teoritis terorisme ada yang berpandangan bahwa deradikalisasi sebagai tindakan yang tidak realistis mengingat substansi yang harus diubah adalah ideologi yang terkait dengan keagamaan. John Horgan, peneliti dan pakar terorisme dari AS, menyatakan bahwa “... *that deradicalization may not be a realistic objective and the goal of terrorist rehabilitation programs should be of disengagement*”.¹⁵

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa setelah mewawancarai beberapa lusin mantan terroris, tidak ada satupun dari mereka yang betul-betul terderadikalisasi. Mereka hanya memutus hubungan dari kelompoknya dan meninggalkan aksi kekerasannya atau

¹³ Hamka Hasan dkk, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁴ Omar Ashour, *Deradicalization Islamist Militants*, (New York: Sage Publication, 2009), hlm. 6

¹⁵ Angel Rabassa, *op.cit.*, hlm. xiii.

disengaged. Ideologi radikal sebagai dasar kepercayaannya tetap mereka pertahankan. Berikut adalah kutipan dari John Horgan dalam Angel Rabassa “... *after interviewing dozens of former terrorists, Horgan concluded that while they were all disengaged, none was truly deradicalized*”.¹⁶

Sedangkan Angel Rabassa et. al, dalam sebuah penelitian yang disponsori oleh RAND Corporation yang berjudul “*Deradicalizing Islamist Extremist*”, menyimpulkan bahwa deradikalisasi itu diperlukan dan dapat dikerjakan. Deradikalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit yang menimbulkan pandangan skeptis, tetapi deradikalisasi dibutuhkan untuk mencegah dan menetralsir aksi-aksi terorisme.

*Deradicalization, in fact, may be particularly difficult for Islamist extremists because they are motivated by an ideology that is rooted in a major world religion. The tenets of the ideology, therefore, are regarded as religious obligations. Nevertheless, deradicalization may be necessary to permanently defuse the threat posed by these individuals. If a militant disengages solely for instrumental reasons, when the circumstances change, the militant may once again take up arms. Conversely, when deradicalization accompanies disengagement, it creates further barriers to recidivism.*¹⁷

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kemungkinan individu untuk melakukan transformasi paham radikal menjadi moderat sangat tergantung pada tingkat komitmen mereka pada organisasinya. Komitmen ini dapat diukur dari tingkatan afektif, pragmatis, dan ideologis. Afektif mengacu pada keterkaitan emosional seseorang terhadap anggota kelompok dan organisasi itu sendiri. Adapun pragmatis mengacu pada faktor-faktor yang membuat mereka sulit untuk meninggalkan organisasi tersebut, misalnya material atau hukuman yang mengakibatkan dendam. Sedangkan komitmen ideologis merupakan hal yang tersulit bagi para teroris.

Untuk dapat meninggalkan ideologi diperlukan orang yang bisa meyakinkan bahwa ideologi yang dianutnya tidak tepat dan perlu diluruskan. Orang tersebut harus mampu meyakinkan, memiliki pengetahuan yang lebih luas dari teroris, dan kredibel bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan para teroris tersebut. Dialog keagamaan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. xiii.

dapat digunakan sebagai metode untuk merehabilitasi ideologi mereka. Untuk itu para pegiat deradikalisasi harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan ideologi tersebut dari berbagai tinjauan pengetahuan dan dimensi.

Deradikalisasi di Indonesia

Dalam sejarah kontemporer Indonesia, deradikalisasi bukan barang baru tetapi telah terjadi sejak tahun 1970 an. Menurut penelitian Setara Institut, Komando Jihad merupakan salah satu contoh program deradikalisasi di Indonesia yang dilaksanakan pada periode 1962-1977. Targetnya adalah tokoh-tokoh DI/NII yang melakukan ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Tokoh-tokoh yang melakukan ikrar setia tersebut adalah: Adah Djaelani, Daud Muhamad Hasan, Tahmid rahmad Basuki, Dodo Muhamad Darda, Ateng Djaelani dan Djaja Sudjadi. Model deradikalisasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam program ini melalui pendekatan Ekonomi.

Pendekatan ini merupakan pendekatan pragmatis transaksional. Mereka diberi akses ekonomi untuk menjalankan usaha di bawah binaan Kodam Siliwangi, bahkan ada beberapa orang yang direkrut dan dipekerjakan sebagai staf di Kodam Siliwangi. Menurut Solahudin, program ini pada awalnya berhasil, terbukti beberapa dari mereka seperti Adah Djaelani dan Ateng Djaelani menjadi pengusaha perminyakan yang sukses di Jawa Barat. Namun demikian, para mantan anggota DI/NII ini kemudian memanfaatkan posisi strategis dan keberhasilan ekonomi mereka untuk melakukan konsolidasi menyatukan kekuatan yang selanjutnya melakukan perang terbuka melawan pemerintah RI. Sesuatu yang menarik dalam program ini adalah keberhasilan mereka di bidang ekonomi ternyata tidak melunturkan ideologinya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).¹⁸

Selanjutnya adalah deradikalisasi yang dilakukan oleh Laskar Jihad yang dipimpin oleh Jafar Umar Tholib. Laskar Jihad adalah sayap militer dari Forum Komunikasi Ahlus Sunah Wal Jamaah (FKASWJ). Laskar ini dibentuk berdasarkan fatwa Ulama Salafi dari Timur Tengah agar umat Islam berjihad di Ambon untuk membantu saudaranya yang sedang berperang di sana. Hal yang menarik adalah, kelompok radikal keagamaan ini secara serentak melakukan

¹⁸ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Setara Institut, 2012), hlm. 175-176.

deradikalisasi sendiri setelah ada fatwa lagi dari ulama Salafi Syekh Robi bin Hadi al-Makdhali dari Madinah agar Laskar Jihad dibubarkan.¹⁹

Contoh deradikalisasi lainnya adalah yang dilakukan oleh jamaah Tarbiyah, kelompok Salafi yang menjadi cikal bakal kader-kader PKS. Anggota kelompok ini pada awalnya sangat eksklusif, memiliki identitas yang khusus seperti para kaum lakinya menggunakan celana komprang, baju koko dan memelihara janggut yang panjang. Sedangkan para wanitanya menggunakan pakaian hijab serba hitam karena mengharamkan pakaian yang berwarna banyak. Begitupula di kancah politik nasional, pada awalnya PKS adalah partai yang sangat eksklusif, namun seiring berkembangnya waktu, tereksposnya mereka pada interaksi sosial dan politik yang lebih terbuka, dan akses ekonomi yang lebih baik maka ideologi mereka juga mulai terbuka. Realitas kekinian, PKS telah menjadi partai terbuka baik dari aspek sikap, tingkah laku maupun ideologinya.²⁰

Berikutnya adalah inisiatif deradikalisasi yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Untuk menetralkan kelompok radikal bersenjata di wilayah ini, pada pertengahan tahun 2007, Polri menerapkan program deradikalisasi melalui program peningkatan keterampilan dan pengembangan ekonomi. Para anggota kelompok jihad di wilayah ini diberi pelatihan ketrampilan. Pada tahap awal, sebanyak 16 orang dibawah pimpinan Sofyan Djumpai alias Pian diberi pelatihan otomotif dan keterampilan pertukangan. Setelah mereka lulus, pemerintah dalam hal ini Polri memberi bantuan modal untuk menjalankan usahanya guna menopang perekonomian mereka. Pada tahun 2008, program dilanjutkan dan diperluas kepada 19 orang para istri dan janda kombatan. Program terus diperluas baik dari segi kuantitas target maupun materi programnya. Mereka diberi pelatihan kuliner dengan tujuan untuk dapat mengembangkan usaha kuliner.²¹

Selain program deradikalisasi yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sebuah program deradikalisasi yang dilakukan oleh para peneliti UI yang bekerjasama dengan Nasir Abbas, mantan anggota kelompok teroris Jemaah al-Islamiyah yang menjabat sebagai Kepala Mantiqi III. Program deradikalisasi ini berupa dialog yang dilakukan dengan kelompok radikal teroris yang masih berada dalam Rutan, Lapas maupun yang sudah dilepas di masyarakat.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 178-179.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 180-182.

²¹ *Ibid.*, hlm. 182-183.

Dialog tersebut berupa diskusi dengan melibatkan beberapa Ustadz dari Pusat Kajian Alquran di Jakarta. Diskusi yang dilaksanakan seminggu sekali selama 12 minggu ini mengambil topik keagamaan dan diluar keagamaan yang terkait dengan konteks sosial ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk mengubah ideologi sangat sulit, bahkan ada beberapa peserta yang menyatakan secara tegas penolakannya.

Mereka lebih terbuka jika diskusinya membahas masalah-masalah yang konkrit dan praktis seperti kesejahteraan dan masalah sosial serta keamanan. Mereka juga lebih lunak bila berbicara empat mata. Mereka juga lebih suka berbicara dengan para Ustadz yang memiliki pengalaman lapangan atau praktisi dan aktivis daripada dengan para akademisi, meskipun gelarnya profesor. Dari hasil eksperimen ini, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, deradikalisasi yang pada hakekatnya untuk merubah ideologi mereka sangat sulit dilakukan meskipun tetap bisa diupayakan melalui jalan yang panjang. Oleh karena itu, dia lebih memilih *disengagement* merupakan sasaran pembinaan narapidana terorisme, karena merubah perilaku jauh lebih mudah daripada merubah pikiran dasar seseorang.²²

Beberapa data empiris tentang program deradikalisasi yang terjadi di Indonesia tersebut pada hakekatnya merupakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pembinaan tersebut mencakup pada tataran sikap (*attitude*) yang bersifat afeksi, perilaku (*behaviour*) yang bersifat keterampilan (*skill*) yang bersifat pragmatis, dan akal/pikiran/pengetahuan (*knowledge*) yang bersifat ideologis. Dengan demikian, keberhasilan dari program deradikalisasi akan sangat tergantung dari tujuan yang ingin dicapai apakah realistis atau tidak, sumber daya yang menjalankan, minat ataupun partisipasi dari target program serta kondisi lingkungan dan sarana prasarana pendukungnya.

Permasalahan dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi di Indonesia

Permasalahan Kritis Radikalisasi Terorisme

Berbagai permasalahan kritis dan tantangan radikalisasi terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya perangkat hukum yang dapat menjerat seseorang yang menyebarkan kebencian (*hate speech*). Absennya perangkat hukum ini merupakan celah bagi

²² Sarlito Wirawan Sarwono, *op.cit.*, hlm. 130-136.

kelompok radikal teroris untuk melakukan propaganda ataupun provokasi melalui penyebaran kebencian seperti pengkafiran, penistaan, dan pengharaman kelompok lain sehingga memicu intoleransi dan kemarahan yang dapat berujung pada tindakan kekerasan terorisme.

2. Mudahnya akses informasi melalui jaringan internet ataupun media cetak dan buku-buku yang memuat ajaran radikal terorisme. Kemudahan akses terhadap material radikal ini dapat mengakselerasi proses radikalisasi terorisme baik secara mandiri maupun kelompok melalui diskusi dan atau pembelajaran.
3. Distorsi pemahaman jihad dan mati syahid sebagai amalan tertinggi dalam Islam. Distorsi terhadap 2 terminologi penting dalam agama Islam ini digunakan untuk menggoda seseorang menjadi teroris dan mengorbankan nyawanya dengan imbalan kenikmatan surgawi.

Permasalahan Kritis Deradikalisasi Terorisme di Indonesia

Berbagai permasalahan kritis dan tantangan deradikalisasi terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya perlawanan masyarakat terhadap program tersebut. Ada kelompok masyarakat menuduh program deradikalisasi merupakan program titipan Amerika Serikat untuk menyudutkan Islam. Program deradikalisasi terorisme merupakan program deislamisasi. Harits Abu Ullia, dalam situs Hizbut Tahrir Indonesia berjudul "Deradikalisasi=Deislamisasi".²³ Dikatakan bahwa program deradikalisasi BNPT merupakan program pesanan dari Amerika Serikat dan para sekutunya untuk mendiskreditkan agama Islam, menggerus semangat jihad dan menutup gerak kebangkitan Islam serta menjadikan umat jauh dari pemahaman dan sikap beragama Islam yang *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Deradikalisasi justru akan memelihara kalangsungan imperialisme Barat di Indonesia. Dalam kesimpulannya, artikel tersebut menyebutkan bahwa:

²³ Harits Abu Ullia, "Deradikalisasi=Deislamisasi", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/10/28/deradikalisasi-deislamisasi/>, diunduh pada 30 April 2014.

Bahaya yang lebih besar dari deradikalisasi adalah tetap bercokolnya sistem sekular dengan demokrasinya serta semakin terjauhkannya sistem Islam. Padahal jelas, selama ini demokrasi dan sekularisme telah menjerumuskan umat Islam ke dalam jurang kehidupan yang sempit dalam seluruh aspeknya.²⁴

2. Deradikalisasi kurang tepat sasaran. Kritik tajam terhadap program ini juga disampaikan oleh Muh. Kholid AS, seorang jurnalis Alumnus Ngruki, dalam artikelnya yang berjudul “Deradikalisasi dengan Peta Buta” dikatakan bahwa program deradikalisasi yang dipelopori oleh BNPT masih jauh dari berhasil, buktinya aksi terorisme terus berlangsung. Program deradikalisasi BNPT baru menasar mantan teroris saja, sedangkan simpatisan dan masyarakat yang rentan terhadap virus terorisme belum digarap. Lebih lanjut dikatakan bahwa 30% dari mantan teroris yang menjadi target deradikalisasi kebal terhadap program tersebut. BNPT kurang cermat dalam memilih partner untuk menjalankan program. Banyak partner yang ditunjuk BNPT tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam komunitas target dari program tersebut sehingga program tersebut tidak efektif.²⁵
3. Deradikalisasi kurang efektif. Hasil penelitian Syafiq Hasyim terhadap beberapa mantan teroris menyebutkan bahwa deradikalisasi tidak efektif karena cenderung pada aspek ideologi. Sedangkan ideologi sendiri sulit untuk diubah tanpa usaha terus menerus yang mencakup beberapa aspek seperti kesejahteraan, pendidikan dan sosial budaya.

Tantangan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia

Berbagai tantangan kritis deradikalisasi terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut

1. Sulit untuk menentukan seseorang itu benar-benar telah mengalami deradikalisasi. Perubahan seseorang pada tataran ideologi tidak mudah diukur. Salah satu cara untuk menilai perubahan seseorang adalah dengan mengobservasi perkataannya dan tindakannya, meskipun kata-kata dan tindakan belum pasti menunjukkan gambaran

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muh. Kholid AS, “Deradikalisasi dengan Peta Buta, dalam <http://opini-media.blogspot.com/2013/06/deradikalisasi-dengan-peta-buta.html?m=1>, diunduh pada 29 April 2014.

akurat dari tujuan seseorang. Persoalan ini menjadi mendasar bagi kelompok radikal teroris yang berlandaskan keagamaan, mereka berpartisipasi dalam program deradikalisasi karena sebuah tekanan ataupun keuntungan praktis yang ingin diperolehnya seperti untuk mendapatkan kebebasan dari penjara, insentif ekonomi atau yang lainnya. Beberapa residivis teroris yang terjadi di Indonesia telah menjadi bukti bahwa deradikalisasi mereka hanyalah sebuah kesemuan, kepura-puraan karena kepentingan praktis mereka, contohnya Abdulah Sonata dan Joko Solo alias Ubeid.

2. Adanya penolakan dari teroris maupun mantan teroris. Meskipun deradikalisasi adalah sesuatu yang dapat diterima oleh sekelompok individu radikal teroris, tetapi tidak sedikit yang menolaknya. Mereka yang menolak tetap tidak bisa menerima program ini dengan alasan apapun. Masalahnya tidak cukup tersedia data resmi yang valid tentang tidak adanya kompromi terhadap penolakan program ini. Beberapa klaim keberhasilan dari program deradikalisasi yang ada saat ini tidak didukung oleh data yang benar-benar valid.
3. Belum adanya kriteria untuk mengukur keberhasilan deradikalisasi. Banyak program deradikalisasi yang isinya mengandung komponen selain ideologi. Dengan kata lain, tidak hanya memasukkan materi keagamaan tetapi juga kegiatan-kegiatan yang lebih nyata seperti tawaran pekerjaan, keahlian, pelatihan, subsidi/bantuan ekonomi lainnya untuk meningkatkan kerjasama antara target dengan pelaksana program. Strategi ganda ini, menyulitkan kita untuk mengetahui bahwa perubahan pandangan radikal teroris tersebut karena benar-benar transformasi ideologi atau hanya kebutuhan pragmatis yang bersifat transaksional semata.

Kesimpulan

1. Terorisme adalah istilah yang memiliki banyak definisi karena belum ada teori yang mampu mendefinisikan istilah tersebut secara universal. Definisi istilah tersebut dipengaruhi oleh kepentingan dan konteks dari yang mendefinisikan istilah tersebut.
2. Radikalisasi terorisme adalah sebuah proses dimanaseseseorang mengadopsi paham radikal terorisme. Sebaliknya, deradikalisasi terorisme adalah sebuah proses dimana seseorang meninggalkan paham radikal terorismenya.

3. Deradikalisasi merupakan proses yang sulit karena ideologi radikal keagamaan mendasari pola pikir, pola sikap dan pola tindak mereka.
4. Hate speech, kemudahan akses informasi, distorsi pemahaman jihad dan mati syahid merupakan masalah kritis radikalisasi terorisme di Indonesia.
5. Perlawanan dari sebagian masyarakat dan teroris terhadap program deradikalisasi dan belum adanya alat ukur/indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan deradikalisasi merupakan masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pegiat program deradikalisasi terorisme di Indonesia.

Saran

1. Program deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu disosialisasikan dan dibumikan pelaksanaannya melalui: sistem pemasyarakatan bagi para narapidana terorisme; MUI bagi masyarakat luas; dan sistem pendidikan nasional ke sekolah-sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.
2. BNPT perlu menyampaikan tolok ukur program deradikalisasi dan mempublikasikan tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan selama ini sehingga masyarakat tidak skeptis terhadap program tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashour, Omar. 2009. *Deradicalization Islamist Militants*. New York: Sage Publication.
- Djelantik, Sukawarsini. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Indonesia: Pustaka Obor.
- English, Richard. 2009. *Terrorism How to Response*. New York: Oxford University Press.
- Hasan, Hamka dkk. 2013. *Blueprint Deradikalisasi*. Jakarta: BNPT.
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos. 2012. *Dari Radikalisme Menuju terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal ddi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Setara Institut.
- Rabassa, Angel et.al. 2011. *Deradicalizing Islamist Extrimists*. USA: Rand Corporation.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologis*. Jakarta/Tangerang: Pustaka Alfabet.
- Schmid, Alex P. 2013. *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. The Hague: ICCT.
- Silber, Michael D. dan Arvin Bhatt. 2007. *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*. New York: NYPD.

Jurnal

- Ruby, Charles L. 2002. "The Definition of Terrorism". *Analyses of Social Issues and Public Policy*.

Website

- Kholid, Muh. AS, "Deradikalisasi dengan Peta Buta, dalam <http://opini-media.blogspot.com/2013/06/deradikalisasi-dengan-peta-buta.html?m=1>, diunduh pada 29 April 2014.
- Ullyya, Harits Abu, "Deradikalisasi=Deislamisasi", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/10/28/deradikalisasi-deislamisasi/>, diunduh pada 30 April 2014.